

Independent Learning: Forming The Pancasila Learner Through Historical Learning In Senior High School

Anju Nofarof Hasudungan¹, Nur Fatah Abidin²

SMAN 1 Rupert¹

Universitas Sebelas Maret²

¹anjunofarof@gmail.com, ²nurfatah@staff.uns.ac.id

Article History

accepted 1/09/2020

approved 4/10/2020

published 1/12/2020

Abstract

In the midst of the industrial revolution 4.0 and the rise of identity politics and populism. Therefore, a policy is needed that brings back Pancasila as the identity of the nation. Through the concept of Free Learning education, the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia strives to generate profiles of Pancasila students. The Ministry of Education provides six indicators of pancasila student profile. Namely, noble morality, creativity, mutual assistance, global diversity, critical reasoning, and self-reliance. Historical subjects are considered as subjects capable of shaping the profile of Pancasila students. Especially in high school, historical subjects have a relatively large share in terms of time allocation. Besides, the relevance between Pancasila and history lessons gives space for teachers to explore and instil Pancasila values in students. The purpose of this research is to describe the formation of Pancasila Student Profile through historical learning. This research uses qualitative research methods of descriptive analysis. Data collection methods use literature and document studies. It is hoped that through historical learning both through the content of the content and the learning process and its relevance to Pancasila, the establishment of Pancasila Student Profile becomes an inevitable.

Keywords: Free learning, pancasila students, historical learning, character education, industrial revolution 4.0, identity politics

Abstrak

Di tengah arus Revolusi Industri 4.0 dan menguatnya politik identitas dan populisme. Maka, diperlukan sebuah kebijakan yang mengusung kembali mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Melalui konsep pendidikan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berupaya untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mendikbud memberikan enam indikator profil pelajar Pancasila. Yakni, berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebhinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Mata pelajaran sejarah dianggap sebagai mata pelajaran yang mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Terutama pada pendidikan menengah atas, mata pelajaran sejarah memiliki porsi yang relatif besar dalam aspek alokasi waktu. Selain itu, relevansi antara Pancasila dan pelajaran sejarah memberikan ruang untuk guru mengeksplorasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terbentuknya Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran sejarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Diharapkan melalui pembelajaran sejarah baik melalui konten isi dan proses pembelajaran serta relevansinya terhadap Pancasila maka terbentuknya Profil Pelajar Pancasila menjadi keniscayaan.

Kata kunci: Merdeka belajar, pelajar pancasila, pembelajaran sejarah, pendidikan karakter, revolusi industri 4.0, politik identitas



PENDAHULUAN

Meningkatnya politik identitas pada masa pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014 dan 2019 juga memberikan pengaruh negatif kepada peserta didik. Pengaruh tersebut terlihat dari keikutsertaan peserta didik dalam debat-debat politik yang bernuansa Suku Agama Ras dan Antar Etnis. Peserta didik mulai saling meragukan keindonesian seseorang yang berbeda suku dan agama dari dirinya. Hal tersebut juga didukung narasi-narasi kebencian atau yang sering disebut *hate speech* yang marak bertebaran di dunia media sosial. Keterlibatan pelajar melakukan tindakan *hate speech* terbuka lebar. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia menunjukkan lebih kurang 30 juta anak dan remaja Indonesia menghabiskan waktu bermain dengan dunia digital tanpa pengawasan orang tua (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2014). Diperkuat lagi dengan argumentasi bahwa secara psikologis emosi remaja masih labil sehingga mudah dipengaruhi (Riswani et al. 2019). Kemungkinan remaja terlibat dengan tindakan *hate speech* juga dapat dilihat dari sikap siswa terhadap *hate speech* itu sendiri karena sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (T. Suryani 2013). Sebagaimana kita ketahui, peserta didik adalah generasi melek teknologi informasi yang sangat aktif bermedia sosial tetapi lemah pada kemampuan berpikir kritis. Lemahnya dalam menganalisis mana berita yang benar dan bohong, literasi digital serta pemahaman mengenai ideologi Pancasila. Selain itu, juga tidak dipungkiri bahwa narasi kebencian tersebut dengan sengaja diproduksi oleh pihak tertentu yang memiliki motif politik dan kekuasaan.

Narasi kebencian terhadap yang berbeda mulai muncul kepermukaan dengan aksi-aksi nyata, bukan lagi di media sosial. Misalkan, ikut dalam demonstrasi yang bermotif politik dan sebenarnya peserta didik dilarang untuk ikut dalam hak demokrasi tersebut. Melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang peserta didik untuk demo. Ucapan-ucapan kebencian dalam aksi demonstrasi menjadi hal yang biasa di masa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019 dan pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Sebenarnya, berdemonstrasi adalah hak demokrasi, hak untuk menyampaikan aspirasi dan itu sah dalam Undang-undang negara ini. Menjadi catatan serius, saat demonstrasi tersebut alat dan wadah untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap sesama anak bangsa apalagi jika melibatkan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Para penguasa dan politikus sebenarnya tidak memperdulikan akibat dari strategi politik yang mereka gunakan. Mereka hanya tahu bagaimana mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara termasuk mengeksploitasi kebencian. Mereka tetap bisa berteman seperti biasa bahkan berbagi kekuasaan pasca pemilu selesai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi saat ini. Masalahnya, masyarakat diakar rumput termasuk peserta didik menjadi korban dari keberingasan elit politik. Masih sulitnya masyarakat Indonesia untuk bersatu saat ini, walaupun elit politik yang mereka dukung pada dasarnya telah bersama-sama dalam kekuasaan.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dibawah garis komando Nadiem Anwar Makarim telah memulai program yang disebut Merdeka Belajar. Diluncurkan pertama kali pada acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta 11 Desember 2019. Satu diantara tujuan konsep pendidikan Merdeka Belajar adalah menghasilkan Profil Pelajar Pancasila. Tujuan tersebut penting untuk dicapai mengingat dampak dan kekuatan Kemendikbud atas fenomena Revolusi Industri 4.0 dan maraknya politik identitas yang telah merambat ke dunia pendidikan khususnya yang melalui media sosial-medianya peserta didik dan. Maka perlu dilakukan upaya untuk mengaktualisasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Mendikbud

memberikan enam indikator Profil Pelajar Pancasila. Yakni, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebhinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Enam indikator tersebut dianggap menjadi karakter utama yang harus dipenuhi seorang peserta didik untuk menjadi Pelajar Pancasila. Sebenarnya, tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional telah juga merumuskan karakter yang harus dicapai oleh peserta didik yakni, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Apakah profil pelajar Pancasila bertentangan atau turut memperjelas tujuan pendidikan nasional? Bagaimana dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada era Mendikbud sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan peneliti jelaskan pada bagian pembahasan.

Merujuk pendapat Sartono Kartodidjo yang menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah tetapi juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran sejarahnya (N. Suryani 2013). Pada akhirnya, pembelajaran sejarah berpotensi menjadi media untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. Pada pendidikan menengah atas, mata pelajaran sejarah memiliki alokasi waktu yang relatif besar, terdiri dari Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari baik kelas jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) maupun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan alokasi dua jam pelajaran dalam seminggu. Selanjutnya, Sejarah Peminatan yang hanya diajarkan di kelas jurusan IPS dan memiliki alokasi waktu tiga jam pelajaran. Artinya, peserta didik dari kelas jurusan IPS mempelajari sejarah selama lima jam pelajaran dalam seminggu. Dengan demikian, adanya relevansi Pancasila dan mata pelajaran sejarah memberikan kesempatan dan ruang kepada guru untuk mengeksplorasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Oleh karena itu, terbentuknya Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran sejarah menjadi keniscayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terbentuknya Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran sejarah pada pendidikan menengah atas.

METODE

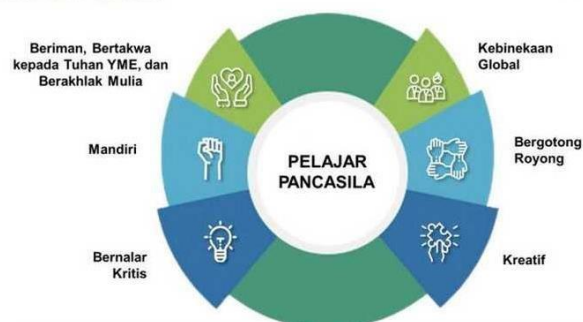
Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah lapangan, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrumen utama yang mengadakan sendiri pengamatan, wawancara, dan pendokumentasian (Joebagio 2017). Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen. Kerena, program Profil Pelajar Pancasila adalah program baru Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim. Maka, penelitian ini banyak melakukan sintesis antara kajian mengenai Pancasila terdahulu, pembelajaran sejarah, dan penjelasan Kemendikbud mengenai Profil Pelajar Pancasila. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari laman Kemendikbud dan portal berita yang telah diakui kredibilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pelajar Pancasila

Kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini mencanangkan sebuah paradigma pendidikan

yang baru yakni, Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru. Maka dari itu guru yang memiliki kompetensi profesional wajib mengajar dengan menciptakan belajar yang merdeka supaya proses pembelajaran bisa membuat siswa lebih kreatif untuk menimba ilmu secara mendalam dimana menciptakan suasana yang membahagiakan (Pendi 2020). Indikator Profil Pelajar Pancasila menurut Nadiem (Prodjo 2020) sebagai berikut:



Gambar 1.1 Profil Pelajar Pancasila (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020)

Pertama, pelajar Pancasila Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia. Bahwa, Pelajar Pancasila mengerti apa itu keadilan sosial, spiritualitas, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam. *Kedua*, kreativitas, Pelajar Pancasila punya kemampuan untuk untuk menciptakan hal-hal secara pro aktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi dalam sehari-harinya. Tidak hanya memecahkan masalah (*problem solving*). *Ketiga*, gotong royong. pelajar Pancasila mengetahui cara gotong royong. Pelajar Pancasila harus tahu cara berkolaborasi dan bekerjasama sesama muridnya terutama di era industri 4.0. *Keempat*, kebhinekaan global, yakni perasaan menghormati keberagaman. Kebhinekaan global adalah toleransi terhadap perbedaan. Mampu menerima perbedaan, tanpa rasa *judgement*, tanpa menghakimi, dan tidak merasa dirinya atau kelompoknya dia lebih baik dari kelompok lain bukan hanya di lingkup Indonesia tetapi juga dunia. *Kelima*, bernalar kritis, adapun bernalar kritis seperti kemampuan beranalisa dan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang nyata. Kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai solusi untuk suatu permasalahan. Bernalar kritis merupakan asesmen kompetensi yang akan diuji oleh Kemendikbud dalam Kebijakan Merdeka Belajar. *Keenam*, kemandirian, pelajar Pancasila harus memiliki kemandirian. Kemandirian itu bertumpu dari namanya *growth mindset*, yaitu suatu filsafat bahwa 'saya bisa menjadi lebih baik, kalau saya terus berusaha sehingga saya ingin terus mencari informasi lebih banyak, saya harus bekerja keras karena saya bisa menjadi lebih baik'. *Growth mindset* adalah kunci *mindset* untuk kemandirian peserta didik. Penilaian terkait kemandirian bisa diukur dengan indikator motivasi. Apakah peserta didik terdorong dengan motivasi dalam hatinya atau harus terus didorong dari luar. Pada akhirnya identitas nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari bangsa Indonesia dapat membentuk generasi Indonesia yang terbuka, berkewargaan global-dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya yakni, Pancasila.

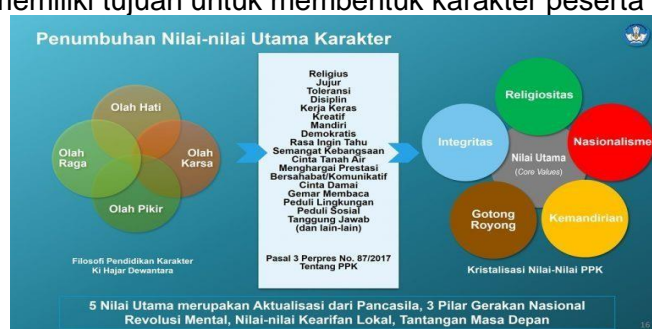
Pembelajaran Sejarah Membentuk Profil Pelajar Pancasila

Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas, pembelajaran sejarah dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, pembelajaran Sejarah Indonesia Wajib dan kedua adalah Sejarah Peminatan. Mata pelajaran Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik baik dari kelas IPA maupun IPS dengan alokasi dua jam

pelajaran. Sedangkan mata pelajaran Sejarah Peminatan hanya diajarkan kepada peserta didik dari kelas IPS dengan alokasi tiga jam pelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2013, mata pelajaran Sejarah Indonesia menjadi mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh semua peserta didik di jenjang pendidikan menengah, tanpa memandang penjurusan atau peminatan yang diambilnya termasuk di jenjang sekolah vokasional (Pratama, Maskun, and Lestari 2019).

Oleh karena itu, kedudukan dan peran dari mata pelajaran sejarah sangat efektif dan efisien dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila. Utamanya, karena adanya relevansi serta ruang untuk mempelajari, baik dari aspek sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui proses pembelajaran sejarah itu sendiri. Aman mengatakan bahwa materi sejarah merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan, menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup (Fimansyah and Kumalasari 2015).

Apakah enam indikator Profil Pelajar Pancasila yang diuraikan oleh Mendikbud saat ini bertentangan atau malah memperkuat tujuan pendidikan nasional? Apakah Pelajar Pancasila relevan atau tidak dengan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter peserta didik.



Gambar 1.2 Penumbuhan Nilai Utama Karakter (Pusat Penguatan Karakter 2018)

Tujuan pendidikan nasional yang telah peneliti ungkapkan di bagian pendahuluan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional juga soal pendidikan karakter. Jika peneliti perhatikan ada sepuluh karakter yang idealnya dicapai oleh peserta didik. Pertanyaannya apakah tujuan pendidikan nasional dan PPK yang sebelumnya telah dirumuskan pemerintah saling bertentangan atau malah saling mendukung terhadap Profil Pelajar Pancasila. Jika memperhatikan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Maka, PPK dan tujuan pendidikan nasional maupun Profil Pelajar Pancasila tidak bertentangan atau kontradiktif melainkan berkelanjutan dan saling mendukung.

Selain melalui pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah, pengembangan Profil Pelajar Pancasila bisa diwujudkan dalam empat hal-yakni, melalui pembiasaan, melalui pembinaan kesiswaan dan melalui manajemen sekolah (Suhardiman 2020). Artinya, seluruh elemen yang ada pada satuan pendidikan harus bekerjasama untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. Perihal pengamalan dan pengamanaan Pancasila tidak bisa dipahami tanpa pemahaman sejarah. Ironisnya masih terjadi distorsi pemahaman tentang sejarah Pancasila (Hariyono 2020). Distorsi tentang sejarah Pancasila dapat diselesaikan melalui pembelajaran sejarah yang kritis dan objektif.

Peserta didik diajak berpikir kritis serta berdiskusi bagaimana Pancasila lahir dan menjadi ideologi bangsa saat ini. Bahkan, perdebatan-perdebatan, kesepakatan, titik temu, musyawarah untuk mufakat hingga peristiwa-peristiwa yang mengancam Pancasila sebagai ideologi Negara dapat guru jadikan sebagai materi pembelajaran sejarah. Dan hal tersebut telah termuat dalam silabus mata pelajaran sejarah baik wajib maupun wajib (Indonesia). Dengan demikian, peserta didik akan terhindar dari karakter seperti intoleran, rasis dan tidak Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan gotong royong merupakan jati diri bangsa Indonesia yang tidak saja diajarkan di sekolah tetapi, juga di luar sekolah. Oleh karena itu, menurut peneliti, pembelajaran sejarah hanya perlu mengingatkan kembali serta memastikan peserta didik tetap menjalankan tradisi dan kebiasaan dua profil tersebut.

Profil kebhinekaan global untuk banyak orang adalah hal baru. Tetapi, jika melihat kembali pemikiran Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dalam paparannya saat mengusulkan sila-sila dasar negara, terdapat pemikiran mengenai internasionalisme. Menurut Soekarno bahwa internasionalisme sama sekali bukan kosmopolitanisme, yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme. Internasionalisme yang sejati adalah pernyataan dari nasionalisme yang sejati, yaitu setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme yang sejati adalah tanda, bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab, telah meninggalkan sifat kekanak-kekanakan mengenai rasa keunggulan nasional atau rasial. internasionalisme yang sejati telah meninggalkan penyakit kekanak-kekanakan tentang chauvinisme dan kosmopolitanisme (Siswoyo 2013). Lalu ada pemikiran politik luar negeri dari Bung Hatta yakni, bebas dan aktif sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Menurut Hatta, politik "Bebas" berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah "Aktif" berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok (Windiani 2010). Dunia dewasa ini yang cenderung semakin terintegrasi secara global pada kenyataannya telah menimbulkan kaburnya batas-batas negara. Bahkan, telah ada pemikiran yang mulai meragukan eksistensi negara-bangsa. Guna mempertahankan eksistensi dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pergaulan internasional serta adanya proyeksi penelitian yang menyebutkan bahwa pada tahun 2050 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor empat di dunia setelah, Tiongkok, India dan Amerika Serikat (Hasudungan and Kurniawan 2018). Maka, karakter kebhinekaan global menjadi keharusan yang dimiliki peserta didik kedepannya.

Profil kreatif dan mandiri, tentu juga pembelajaran sejarah dapat berperan mewujudkannya dengan merujuk fungsi dan kegunaan sejarah yakni, edukatif, inspiratif, rekreatif, instruktif dan masa depan. Fungsi dan kegunaan inspiratif dan rekreatif berarti-sejarah berguna sebagai sumber inspirasi dan hiburan karena kaya akan kisah pengalaman manusia dan peradabannya di masa lalu. Dari sana peserta didik dapat menjadi kreatif. Instruktif dan masa depan artinya sejarah dapat sebagai dasar untuk melakukan sebuah instruksi/keputusan dan menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengadaptasi peristiwa/kemajuan dan tidak mengulangi kesalahan dari masa lalu. Dengan demikian, peserta didik saat belajar sejarah dapat terbentuk karakter mandiri karena mampu mengambil keputusan untuk menciptakan masa depannya.

Menurut Kuntowijoyo terdapat guna ekstrinsik sejarah meliputi fungsi-fungsi pendidikan, yaitu pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu. Selain itu, sejarah juga berfungsi sebagai (9) latar belakang, (10) rujukan, dan (11) bukti. Sedangkan Helius Sjamsuddin menyatakan bahwa sejarah sebagai pengalaman-pengalaman masa lampau menjadikan manusia dapat 'berguru' dan 'belajar' untuk menjadi lebih bijak.

Manusia harus dapat menarik nilai-nilai pelajaran sebagai pedoman hidup dan inspirasi untuk masa-masa yang akan datang (Cakranegara 2020). Menarik, bahwa saat seseorang belajar sejarah secara sungguh-sungguh maka akan mendapatkan banyak manfaat yang tidak hanya memperkaya ilmu dan pengetahuan sejarah tetapi juga kreatifitas dan mandiri.

Pembelajaran sejarah dewasa ini tidak dapat diajarkan secara kronologi dan tekstual, tetapi harus dirubah dengan cara guru agar peserta didik tumbuh *awareness* dan berpikir kritis atau berpikir historis (Joebagio 2017). Untuk itu, satu ciri Profil Pelajar Pancasila yang hendak dicapai adalah bernalar kritis. Korelasi ini menjadi pertanda bahwa berpikir kritis menjadi tujuan yang sama sehingga pembelajaran sejarah dan Profil Pelajar Pancasila sama-sama menghendaki peserta didik berpikir kritis. Tentunya, tujuan ini menjadi tanggung jawab Kemendikbud dan tentunya guru sejarah. Khusus guru sejarah berperan besar untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri pelajar. Tidak lupa, selain dari isi/konten sejarah, Profil Pelajar Pancasila juga dapat terbentuk dengan proses pembelajaran yang diciptakan guru.

Metode, model dan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru juga berdampak pada proses pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Karena, disana ada pembiasaan, keteladanan (pembinaan) dan manajemen. Hasilnya, bahwa tidak diragukan lagi melalui pembelajarn sejarah dapat membentuk Profil Pelajar Pancasila baik melalui isi/konten maupun proses pembelajarannya. Patut dinantikan, bagaimana implementasi program Profil Pelajar Pancasila dapat terlaksana di tengah pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman termasuk bagi dunia pendidikan.

SIMPULAN

Kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju saat ini mencanangkan Profil Pelajar Pancasila. Hal tersebut sangat relevan untuk menyikapi meningkatnya intoleransi, rasisme, narasi kebencian akan yang berbeda dan lainnya. Dampak dari politik identitas yang melanda Indonesia terutama pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 serta Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi jawaban mengapa hal itu terjadi. Terdapat enam indikator untuk dicapai peserta didik agar disebut Pelajar Pancasila. Yakni, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebhinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Adanya relevansi dan ruang yang besar bagi mata pelajaran sejarah pada satuan pendidikan menengah atas menjadi potensi dan kesempatan bagi guru untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. Keenam Profil Pelajar Pancasila dapat ditemukan pada pembelajaran sejarah dan juga sebagai medianya. Berbicara mengenai keimanan dan ketakwaan serta gotong royong adalah bagian dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Sehingga, mata pelajaran sejarah yang juga memuat hal tersebut tentunya lebih mudah untuk melipatgandakan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa serta bergoto royong. Bernalar kritis juga menjadi satu tujuan penting dari belajar sejarah. Mendiskusikan setiap peristiwa sejarah dari berbagai perspektif akan membentuk peserta didik yang kritis (proses pembelajaran sejarah). Mandiri dan kreatifitas pun dapat dicapai peserta didik melalui fungsi dan kegunaan pembelajaran sejarah. Mempelajari pemikiran Soekarno mengenai internasionalisme dan politik bebas-aktifnya Muhammad Hatta, akan terbentuk karakter kebhinekaan global pada diri peserta didik. Melalui konten/isi serta proses pembelajaran sejarah maka niscaya Profil Pelajar Pancasila akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Cakranegara, Joshua Jolly Sucanta. 2020. "Membangun Kesadaran Sejarah Kritis Dan Integratif Untuk Indonesia Maju." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10 (1): 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.811>.

- Fimansyah, Wira, and Dyah Kumalasari. 2015. "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA Kebangsaan Yogyakarta." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 11 (1): 102–88. <https://doi.org/10.21831/istoria.v11i1.5766>.
- Hariyono. 2020. "PANCASILA & PEMBELAJARAN SEJARAH." Surakarta.
- Hasudungan, Anju Nofarof, and Yusuf Kurniawan. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform www.Indonesia2045.org." In , edited by Agus Sifaunajah, 1:51–58. Jombang: SNAMI: Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin KH. A. Wahab Hasullah University Jombang. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/263>.
- Joebagio, Hermanu. 2017. "Tantangan Pembelajaran Sejarah Di Era Globalisasi." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 13 (1): 55–62. <https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17617>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2014. "Riset Kominfo Dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak Dan Remaja Dalam Menggunakan Internet." Kominfo.Go.Id. 2014. https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024*. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://e-ppid.kemdikbud.go.id/dokumen/permendikbud-22-2020-renstra.pdf>.
- Pendi, Yulius Obeta. 2020. "Merdeka Belajar Yang Tercermin Dalam Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 01 Sedayu." In *Seminar Nasional Pendidikan*, 291–99. Yogyakarta: Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Pratama, Rinaldo Adi, Maskun, and Nur Indah Lestari. 2019. "Dinamika Pelajaran Sejarah Indonesia Dalam Kurikulum 2013 Pada Jenjang SMK/MAK." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8 (2): 99–121. <https://doi.org/10.21009/jps.082.02>.
- Prodjo, Wahyu Adityo. 2020. "Apa Itu Pelajar Pancasila, Tujuan Sekolah Penggerak Dari Nadiem Makarim." www.kompas.com. 2020.
- Pusat Penguatan Karakter. 2018. "Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter." www.kemdikbud.go.id. 2018.
- Riswani, Eniwati Khaidir, Suhertina, and Zaliana. 2019. "Sikap Siswa Terhadap Hate Speech Dan Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah Pada Era Revolusi 4.0." In *Konvensi Nasional XXI Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 213–206. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Siswoyo, Dwi. 2013. "Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 5 (1): 103–15. <https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>.
- Suhardiman, Budi. 2020. "WEBINAR KEMENBUD: INI PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN CARA PENGEMBANGANNYA." Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 2020. <http://dispendik.malangkab.go.id/pd/detail?title=dispendik-webinar-kemenbud-ini-profil-pelajar-pancasila-dan-empat-hal-cara-pengembangannya>.

Suryani, Nunuk. 2013. "Pengembangan Model Internalisasi Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Model Value Clarification Technique." *Paramita: Historical Studies Journal* 23 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2674>.

Suryani, Tatik. 2013. *PERILAKU KONSUMEN DI ERA INTERNET*. Edited by 1.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Windiani, Reni. 2010. "POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI."

Politika: Jurnal Ilmu Politik 1 (2): 88–98.
<https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.88-98>.